

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi pemerintahan diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah.

Dalam ajaran agama Islam, pemerintah atau pemimpin suatu Negara wajib mendistribusikan keuangan negara untuk kepentingan daerah agar perekonomian tetap stabil maka pendapatan dan pendistribusian harus seimbang. Keuangan negara/daerah harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dan tidak diperkenankan untuk dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sebagaimana dengan Pendapatan Asli Daerah. Karena sikap dan perbuatan itu dilarang oleh ajaran Islam, seperti yang telah tercantum dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”*

(QS. 4: 29). Dari ayat di atas jelas ada larangan untuk mengambil atau mencari sesuatu yang bukan hak nya. Karena setiap manusia memiliki hak masing-masing dan dilindungi oleh Pemerintah.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi sumber PAD maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (Debora, 2014). Pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen penerimaan daerah, seharusnya menjadi sumber utama bagi daerah sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang, yang pada gilirannya daerah diharapkan akan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat lokal (Basri, 2012).

Dalam meningkatkan perolehan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan melakukan perampingan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungutnya dengan menghapus pungutan yang secara ekonomi memberatkan dan tetap memberlakukan pungutan yang secara ekonomi dapat

memberikan sumbangan yang signifikan bagi pendapatan daerah. (Riduansyah, 2003)

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 18.120 pulau yang di milikinya dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Negara Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

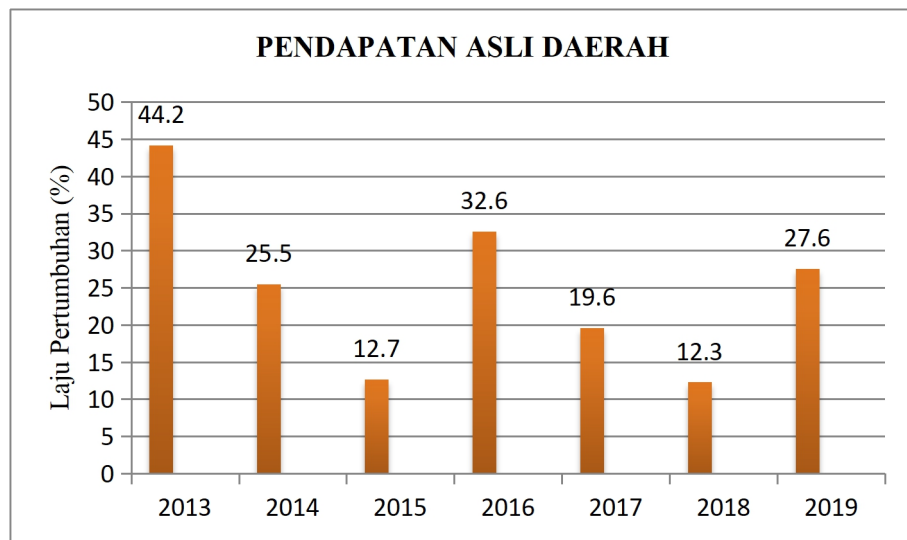
Menurut (Fauzi, 2018) Industri pariwisata memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Dengan adanya pariwisata, tentu akan mendatangkan berbagai dampak diantara lain dampak lingkungan sosial, budaya dan ekonomi. Dari segi ekonomi adanya pariwisata membawa berbagai macam dampak meliputi dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung dari adanya pariwisata adalah pekerja dikawasan tersebut termasuk pemerintah daerah, sedangkan dampak tidak langsung salah satunya adalah berupa meningkatnya permintaan transportasi umum dan lain-lain. Dampak berkelanjutannya tentu berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat yang bekerja dibidang pariwisata ataupun tidak secara langsung tetapi mendapatkan dampak yang sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang berada di daerah wisata melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam pembangunan kepariwisataan ke depan. Pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi strategi yang cocok dikembangkan pada sektor pariwisata saat ini untuk meningkatkan PAD Sektor Pariwisata. Strategi tersebut dikenal dengan istilah *community based tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Konstruksi CBT ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dalam perkembangan pembangunan kepariwisataan (*growth oriented model*), namun seringkali mendapatkan banyak kritik telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan disuatu destinasi wisata.

Pembangunan kepariwisataan terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperbesar penerimaan devisa, untuk pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperkaya kebudayaan nasional dan tetap mempertahankan kepribadian bangsa serta tetap terpelihara nilai agama, mempererat persahabatan antar bangsa, cinta tanah air serta memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup untuk pengembangan produk nasional. Sektor pariwisata di Indonesia merupakan sektor industri yang sedang tumbuh dan berkembang. Segi kehidupan ekonomi nasional berkembangnya pariwisata akan menimbulkan banyak segi positif kemungkinan timbulnya

industri kecil yang semuanya akan membawa kemakmuran bagi rakyat, sehingga dapat mengangkat bangsa Indonesia dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang lebih tinggi.

Gambar 1.1
Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2013-2019 (Rupiah)



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi DIY, 2019.

Dari gambar 1.1 di atas menunjukkan pada sektor pariwisata setiap tahunnya di Provinsi DIY yang kemudian tentunya memberikan dampak positif untuk pemasukan daerah di Provinsi DIY yang disebut dengan pendapatan asli daerah sektor pariwisata. Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa, kenaikan penerimaan pada sektor pariwisata terjadi pada tahun 2013 sampai tahun 2019 meskipun dengan laju pertumbuhan yang setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 pertumbuhan pada sebesar 44,2%.

Sedangkan pada tahun 2014 laju pertumbuhan menurun pada angka 25,5% , selanjutnya pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali pada angka 12,7%. Kemudian pada tahun 2016 laju pertumbuhan mengalami kenaikan pada angka 32,6%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali pada angka 19,6% Selanjutnya pada tahun 2018 laju pertumbuhan mengalami penurunan kembali yaitu pada angka 12,3%. Terakhir pada tahun 2019 laju pertumbuhan mengalami kenaikan yaitu sekitar 27,6%

Industri pariwisata yaitu industri jasa yang memiliki mekanisme aturan yang kompleks dikarenakan mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari negara dan daerah asal, ke daerah tujuan hingga kembali lagi ke daerah dan negara asal yang sangat berkaitan dengan komponen seperti biro perjalanan, *guide* atau pemandu wisata, akomodasi, transportasi dan lain sebagainya.

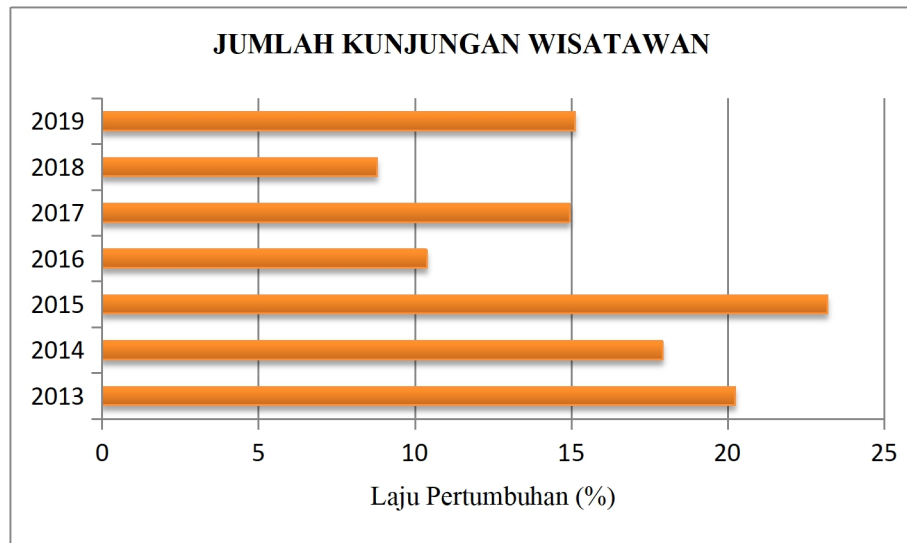
Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun mancanegara, tingkat hunian hotel, banyaknya jumlah objek pariwisata yang terdapat pada suatu daerah dan tentunya meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Jawa. Provinsi ini merupakan provinsi yang memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan provinsi yang lain. Banyak julukan yang diberikan kepada Yogyakarta di antaranya kota budaya,

kota pelajar, kota gudeg dan tempat wisata terkemuka di Indonesia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat banyak kekayaan alam yang dapat dijadikan obyek wisata yang dapat ditemui mulai dari wisata kuliner, wisata alam, wisata sejarah dan budaya. Hal ini dikarenakan potensi wilayah yang sangat mendukung pemerintah Yogyakarta untuk melakukan peningkatan mulai dari infrastruktur, sarana dan prasana agar lebih berkembang dari sebelumnya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga disebut sebagai daerah pariwisata telah banyak melakukan perubahan dengan bertambahnya lokasi-lokasi wisata seperti melakukan renovasi sepanjang jalan di Malioboro dan menyediakan lahan parkir yang luas agar para pejalan kaki dapat merasa nyaman, serta mengembangkan obyek-obyek wisata alam dan wisata lainnya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor pariwisata merupakan hal yang menarik untuk diteliti, sebab sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2013-2019

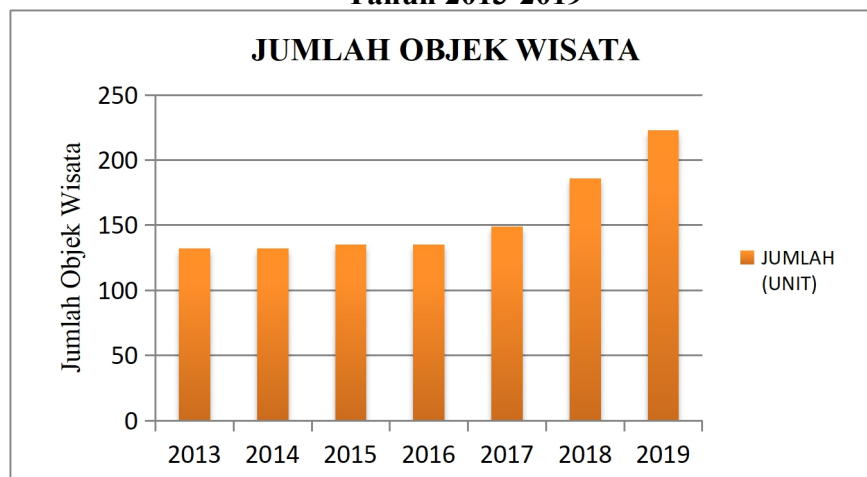


Sumber : Dinas Paiwisata DIY tahun 2019.

Dari gambar 1.2 menunjukkan data jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan laju pertumbuhan yang mengalami fluktuatif pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan laju pertumbuhan pada angka 20,24%. Selanjutnya pada tahun 2014 terjadi penurunan laju pertumbuhan pada angka 17,91% . Pada tahun 2015 laju pertumbuhan mengalami kenaikan pada angka 23,19% . Selanjutnya pada tahun 2016 laju pertumbuhan menurun yakni pada angka 10,37%. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan meningkat pada angka 14,94% , kemudian pada tahun selanjutnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan kembali menurun pada angka 8,79%. Pada tahun terakhir yakni tahun 2019 laju pertumbuhan wisatawan kembali meningkat pada angka 15,12%. Dengan demikian laju pertumbuhan kunjungan wisatawan setiap tahunnya mengalami fluktuatif.

Banyaknya wisatawan yang datang ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan tersebut membuat semakin banyak obyek wisata yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Berikut adalah tabel mengenai jumlah objek wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 – 2019 :

Gambar 1.3
Jumlah Objek Wisata
Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2013-2019



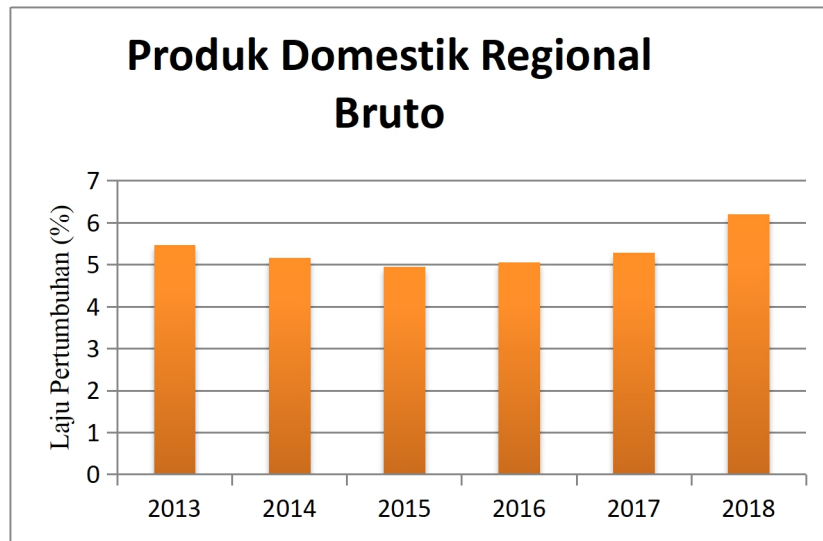
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2013-2019

Gambar 1.3 diketahui pada tabel tersebut jumlah objek wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 sampai 2014 jumlah objek wisata di Provinsi DIY berjumlah 132 unit, sedangkan pada tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 3 unit yaitu menjadi 135 unit objek wisata. Pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan menjadi 149 unit objek wisata. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 186

unit, dan pada tahun terakhir yakni tahun 2019 kembali meningkat menjadi 223 unit objek wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Produk Domestik Bruto (PDRB) rill adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang ada di wilayah suatu negara, baik warga negara dalam negeri atau dari warga negara asing dibagi dengan jumlah penduduk. Besarnya PDRB rill dapat menunjukkan bahwa perekonomian setiap warga negara telah berkembang. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga merupakan salah satu komponen penting sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah. PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu PDRB di setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat, maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, yang pada akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi Yogyakarta. Berikut ini adalah tabel mengenai pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta :

Gambar 1.4
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Harga Konstan menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik DIY Dalam Angka 2019

Berdasarkan Gambar 1.4 diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan PDRB sebesar 5.47%. Tahun 2014 mengalami kenaikan jumlah PDRB pada angka 5,17%. Selanjutnya pada tahun 2015 dengan laju pertumbuhan yang menurun pada angka 4,95%. Selanjutnya pada tahun 2016 laju pertumbuhan meningkat menjadi 5,05%. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan kembali meningkat menjadi 5,26%. Kemudian pada 2018 laju pertumbuhan kembali meningkat 6,2% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 laju pertumbuhan kembali meningkat pada angka 6,6%.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing, dengan demikian pariwisata diharapkan memberikan dampak positif dan kontribusi yang relatif besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut (Widayanti & Dewanti, 2017), dengan Judul Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yakni Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata, Jumlah Objek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah makan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah restoran dan Rumah Makan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata, sedangkan Jumlah Objek Wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Provinsi DIY.

Menurut (Purwanti & Dewi, 2014), dengan Judul Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Kunjungan Wisatawan, dan Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto karena menurunnya jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2011. Tahun 2011 jumlah kunjungan wisatawan paling sedikit diantara tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut (Zelvian Shella, 2014), dengan Penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Kota Banda Aceh. Variabel yang digunakan adalah jumlah wisatawan, jumlah objek wisata,

jumlah hotel, dan lama tinggal wisatawan, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan lama tinggal wisatawan berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Kota Banda Aceh. Sedangkan variabel objek wisata berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata kota Banda Aceh.

Menurut (Fitri, 2014), dengan judul penelitian Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Variabel yang digunakan berupa Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Sarana Akomodasi, Jumlah Tempat Belanja *Tourist*, dan Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa sarana akomodasi dan tempat belanja *tourist* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Jumlah Kunjungan Wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Pesisir Selatan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.”**

B. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang harus dipecahkan agar pembahasan ini tidak terlalu luas dan tetap mengarah pada judul, maka perlu

dilakukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini berfokus pada Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 3 faktor yang mempengaruhi diantaranya, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh variabel Jumlah Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengarah pada permasalahan yang sudah disebutkan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel Jumlah Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini menghasilkan manfaat bagi pihak dan instansi yang terkait diantaranya :

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu diharapkan penulis dapat memahami dan mendalami masalah Pendapatan Asli Daerah khususnya di sektor pariwisata.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2013-2019.

